

Peran Bank Sentral Dalam Mengawasi Stabilitas Lembaga Keuangan Nasional

Fia Puji Lestari¹ Rini Puji Astuti² Aulia Sekar Anggraeni³ Daniel Eka Ardiansyah⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Fiapujilestari2174@gmail.com¹ rinipuji.astuti111983@gmail.com²
auliyasekar2005@gmail.com³ danileka14@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis peran Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. BI bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah melalui tiga pilar utama: kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari artikel dan jurnal relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI memanfaatkan instrumen moneter, seperti pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka, untuk menjaga kestabilan ekonomi. BI juga menggunakan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berdampak pada sektor ekonomi menyeluruh, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sejak 2011, pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang fokus pada pengaturan sektor jasa keuangan. Kolaborasi antara BI dan OJK penting untuk menjaga stabilitas keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat.

Kata kunci: Bank Indonesia, stabilitas keuangan, kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Abstract

This research aims to analyze the role of Bank Indonesia (BI) as the central bank in maintaining the stability of the national financial system. BI is responsible for maintaining the stability of the rupiah value through three main pillars: monetary policy, payment system and banking supervision. The research method used is a literature study by collecting data from relevant articles and journals. The research results show that BI utilizes monetary instruments, such as setting interest rates and open market operations, to maintain economic stability. BI also uses a monetary policy transmission mechanism that has an impact on the entire economic sector, supporting sustainable economic development. Since 2011, banking supervision has shifted to the Financial Services Authority (OJK), which focuses on regulating the financial services sector. Collaboration between BI and OJK is important to maintain national financial stability and protect public interests.

Keywords: Bank Indonesia, financial stability, monetary policy, Financial Services Authority (OJK).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bank Sentral (bank Indonesia atau BI) merupakan lembaga yang sangat penting dalam sistem ekonomi Indonesia. sebelumnya dikenal dengan nama De Javasche Bank, BI memiliki peran utama dalam mengelola kebijakan moneter, memastikan kestabilan mekanisme transaksi keuangan, serta mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan moneter, BI memegang peran penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, yang mencakup kestabilan harga barang dan jasa dalam negeri serta kurs rupiah kepada mata uang asing. Keseimbangan kurs rupiah ini sangat penting dalam menopang kelancaran kegiatan ekonomi domestik serta menjaga daya beli masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, BI mengandalkan tiga fungsi utama yang saling berhubungan: pertama, mencetuskan dan melaksanakan kebijakan fiskal yang tepat, kedua memastikan

kestabilan sistem pembayaran, dan ketiga mengendalikan serta memantau kegiatan perbankan. Ketiga pilar ini bekerja sama dalam mempertahankan stabilitas rupiah, yang menjadi kunci dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, bank Indonesia memiliki hak inklusif untuk mencetak dan mendistribusikan uang sebagai instrumen pembayaran yang resmi di Indonesia. Situasi tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi BI, karena uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia bukan hanya digunakan untuk alat transaksi, tetapi juga mencerminkan kestabilan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter di Indonesia. (Rini et al., 2024)

Pada era modern ini, di mana uang berfungsi sebagai fiat money yakni uang yang nilainya tidak didasarkan pada kondisi fisik seperti emas, tetapi berdasarkan kepercayaan masyarakat dan negara, kepercayaan terhadap mata uang tersebut menjadi sangat penting. Maka dari itu, menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah menjadi kewajiban utama BI, untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap uang yang mereka gunakan dalam transaksi sehari-hari. Tanpa stabilitas nilai mata uang, kegiatan ekonomi akan terganggu, inflasi akan meningkat dan daya beli masyarakat akan menurun. Kewajiban menjaga kestabilan ini tidak sekedar untuk tujuan jangka pendek, namun juga untuk menciptakan pondasi ekonomi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang. Stabilitas keuangan merupakan elemen krusial untuk perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab utama dalam mengendalikan dan mengawasi sektor perbankan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat untuk lembaga. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penjabaran mengenai peran dan hak Bank Indonesia, termasuk pengelolaan dan pemantauan aspek perbankan. Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan perbankan, melindungi nasabah, serta memastikan bahwa bank-bank beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (Dea et al., 2024)

Selain itu pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan selanjutnya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, mewajibkan pembentukan institut pengendalian untuk aspek sistem keuangan, meliputi perbankan, asuransi, dana pensiun, investasi modal venture, dan lembaga pendanaan serta lembaga-lembaga yang memajemen dana masyarakat. (Surti, 2017) Menurut ketentuan dalam UU Nomor 3 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas pengawasan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia kini akan dilaksanakan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan dibuat sesuai dengan undang-undang. Terkait dengan ini, penerbitan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar pembentukan OJK yang mengarah pada peralihan model pengawasan sektor keuangan. Sebelumnya, pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, sementara pengawasan terhadap lembaga keuangan non-bank berada di bawah Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kini, wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, telah tergabung dalam satu lembaga, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. (Hengki, 2023)

Pengaturan dan pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Krisis keuangan yang tidak terkelola dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan, kebangkrutan bisnis dan meningkatnya angka pengangguran, sehingga memperburuk kondisi sosial ekonomi, oleh karena itu bank Indonesia menerapkan pendekatan berbasis risiko dan kehati-hatian dalam upayanya menciptakan lingkungan perbankan yang sehat. Melalui pendekatan ini, bank Indonesia tidak hanya fokus

pada pemantauan kinerja bank, tetapi juga berupaya untuk mengidentifikasi potensi risiko sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Langkah-langkah konkret yang diambil oleh bank Indonesia mencakup pengawasan yang ketat terhadap praktik manajemen risiko di bank-bank, analisis berkala terhadap laporan keuangan, serta evaluasi kepatuhan bank terhadap regulasi yang berkala. Selain itu, bank Indonesia juga aktif dalam memberikan edukasi dan informasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan perbankan, guna melindungi kepentingan mereka dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam sistem perbankan. Setiap negara berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mengontrol jumlah uang yang beredar. Indonesia sempat menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, yang menjadi masa sulit bagi negara ini. Krisis tersebut dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, dan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ini, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting untuk memulihkan kondisi ekonomi dan mengatasi krisis tersebut. (Yunan et al., 2022)

Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang komponen-komponen terkait. Penelitian yang dilakukan oleh Tia et al., 2017, dengan judul "Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilisator Inflasi Dan Kurs Rupiah Di Bidang Moneter" Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang membantu menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mengontrol inflasi dan stabilitas kurs rupiah. Penelitian ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar yang tidak terkontrol dapat merusak stabilitas sektor ekonomi, dengan demikian Bank Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Penelitian yang dilakukan oleh Hengki (2023) yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peran Dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia" berfokus kepada tugas OJK untuk memelihara integritas dan kestabilan sektor keuangan Indonesia. OJK selaku lembaga pengendalian sektor ekonomi berperan dalam menjamin mekanisme ekonomi Indonesia berjalan dengan baik dan sehat, mencegah krisis keuangan yang dapat terjadi akibat ketidakstabilan pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Eva et al. (2023) dengan judul "Studi Kajian Indikator Moneter Dalam Memperkuat Stabilitas Ekonomi" meneliti aspek-aspek moneter yang memiliki fungsi penting untuk memperkuat kestabilan keuangan di Indonesia. Penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan moneter dalam menjaga keseimbangan antara inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar yang stabil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui kajian literatur dari berbagai artikel jurnal, diperoleh informasi mengenai kebijakan moneter dan pengendalian sistem perbankan yang diterapkan Bank Indonesia. Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya melalui pengawasan terhadap sektor keuangan dan lembaga perbankan. Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem keuangan yang sehat, salah satunya adalah kolaborasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya yang sudah dilaksanakan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan perekonomian dan sektor keuangan Indonesia meliputi penerapan kebijakan moneter yang ketat, pengawasan terhadap lembaga perbankan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta kebijakan yang mendukung stabilitas kurs rupiah. Di samping itu, Bank Indonesia secara rutin mengawasi dan menilai keadaan sistem keuangan nasional, berkoordinasi dengan OJK untuk meningkatkan pengawasan sektor perbankan, serta memberikan tindakan tegas terhadap lembaga keuangan yang melanggar aturan. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan sistem keuangan Indonesia tetap sehat dan stabil,

serta mencegah terjadinya krisis ekonomi yang bisa merugikan perekonomian negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan meneliti fungsi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia, serta efektivitas kebijakan moneter dan pengawasan sektor perbankan yang diterapkan Bank Indonesia.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi melalui kebijakan moneter, mekanisme transmisi kebijakan moneter yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan keuangan negara, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga kestabilan sistem keuangan Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia, serta dampak kebijakan moneter dan pengaturan sektor perbankan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Tujuan utama dari kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia adalah untuk memastikan terciptanya sistem keuangan yang stabil, menunjang perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, dan mencegah terjadinya krisis yang dapat merugikan perekonomian negara. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada Peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan Mengatur jumlah sirkulasi uang di Indonesia. Topik yang diteliti menjadi fokus utama penelitian ini, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk merancang penelitian yang efektif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian literatur, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi Data dari berbagai referensi yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini, dikenal juga sebagai tinjauan pustaka, melibatkan pengumpulan data dari berbagai tulisan seperti artikel, jurnal, dan literatur lainnya guna mendukung dan memperkuat argumen penelitian. Peneliti memilih metode ini untuk memperoleh landasan teori yang dapat membantu menjelaskan masalah yang diteliti, sebagai langkah awal dalam memahami masalah secara lebih baik sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank merupakan sektor keuangan yang berperan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito serta memberikan fasilitas pinjaman (kredit) terhadap masyarakat yang memerlukan dana tambahan, seperti modal usaha. Tak hanya itu bank pun bertindak selaku wadah penukaran, pengiriman uang dan penerimaan pembayaran seperti tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, pajak, biaya sekolah, gaji dan pembayaran lainnya. Kata "bank" berasal dari bahasa Itali "Banco" berarti bangku atau meja, dikarenakan dahulu kegiatan perbankan dilakukan di bangku atau meja. (Bachtiar, 2019) Bank juga menjadi bagian inti dari sistem keuangan negara, tempat individu, badan usaha, dan instansi pemerintah menyimpan dana mereka. Dengan menggunakan aktivitas kredit dan berbagai layanan lain, bank mendukung pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran di sektor ekonomi.

Tugas bank bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan negara guna terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Sehingga, kegiatan bank harus bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertujuan menjaga kestabilan kurs rupiah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. UU Nomor 23 Tahun 1999 diperbarui menjadi UU Nomor 23. UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 1 Juni 2009, hal ini tercermin dari stabilisasi kenaikan harga dan kurs mata uang rupiah. Agar tercapai target inflasi, Bank Indonesia

memantau inflasi dan variabel ekonomi lainnya melalui indikator moneter (M1 dan M2), suku bunga, dan kurs rupiah. Proses penyampaian kebijakan fiskal menggambarkan dampak kebijakan moneter bank sentral terhadap perekonomian dan keuangan melalui saluran seperti valuta, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan jalur ekspektasi, dan akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi untuk mencapai stabilitas. (Tia et al., 2017)

Diskusi

Mekanisme Tranmisi kebijakan Moneter

Sebagai regulator moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan mempertahankan stabilitas kurs rupiah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai Bank Indonesia, lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 23. Pasal 7 UU No 3 dan 1 Tahun 2004 dan Perpres No 6 Tahun 2009. Stabilitas tersebut terlihat dalam tingkat kenaikan harga dan kestabilan kurs mata uang rupe pada valuta asing. Agar menjangkau target inflasi, Bank Indonesia memantau evolusi variabel inflasi, perekonomian riil, moneter dan keuangan dengan indikator moneter (M1 dan M2), suku bunga, dan kurs rupiah untuk menjamin tercapainya target inflasi yang telah ditentukan. Prosedur distribusi kebijakan moneter menunjukkan bagaimana keputusan moneter bank sentral memengaruhi aktivitas perekonomian dan keuangan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dampak dari kebijakan ini terjadi melalui berbagai arah, termasuk uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. (Yolanda et al., 2022)

Peran Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 1 ayat (1) UU Perbankan Indonesia menjelaskan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dan lembaga penyelenggara utama perekonomian suatu negara, sehingga keberadaan bank dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Pemerintah juga mencermati perubahan dan perkembangan yang terjadi di industri perbankan. Kehadiran perbankan dinilai menjadi salah satu pelopor utama perekonomian nasional. Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 mengatur perlunya pembentukan badan pengatur jasa keuangan seperti Perbankan dan Asuransi, dana pensiun, surat berharga, modal resiko dan pendanaan publik. (Rustam, 2020) Menurut Utomo (2014), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai respon terhadap perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia yang terkena dampak krisis Asia tahun 1997-1998 yang memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Krisis ini menyebabkan banyak bank bangkrut dan mengharuskan bank-bank di Indonesia memperketat pengawasan.

Untuk membangun sistem keuangan yang lebih tahan pada guncangan ekonomi, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan tugas pengendalian perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK. Peralihan ini diatur pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwasannya per 31 Desember 2012, seluruh peran, tanggung jawab, dan otoritas pengendalian di sektor jasa keuangan, termasuk bursa saham, asuransi, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya yang sebelumnya terafiliasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Pemantauan Pasar Modal dan Institusi Keuangan (Bapepam-LK) semuanya dipindahkan ke OJK. Sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pemantauan industri perbankan juga dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. (Achmad et al., 2023)

Urgensi Bank Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil

Tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia adalah kestabilan kurs rupiah, ialah kestabilan harga barang dan jasa yang terlihat melalui inflasi. Berdasarkan startegi moneter,

inflasi muncul ketika jumlah uang yang beredar melebihi keinginan masyarakat dalam menabung. Lenner (Gunawan, 1995) menyebut inflasi selaku situasi dimana permintaan barang dan jasa secara totalitas melebihi pasokan. Secara makroprudensial, fungsi Bank Indonesia adalah mengatur keseluruhan sistem perbankan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian kepada individu bank. Jika Bank Indonesia menemukan potensi risiko atau penyimpangan pada sistem perbankan, BI akan bekerja sama dengan OJK untuk mengatasi permasalahan sistematis. Inflasi terjadi tidak hanya karena fluktuasi harga tertentu, namun juga terjadi ketika kenaikan harga tersebut meluas ke barang lain. Untuk menilai laju inflasi biasanya dipergunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengindikasikan perubahan harga suatu barang dan jasa yang rutin dikonsumsi masyarakat berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS memantau harga-harga di berbagai pasar secara bulanan untuk melacak perubahan-perubahan tersebut. (Fani And Roni, 2022)

Kestabilan Sistem Keuangan

Bursa efek dan industri perbankan mempunyai peranan penting untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Bengtssoon mengatakan dana pasar uang (MMF) memandang pasar keuangan sebagai faktor penting yang mempengaruhi sektor perbankan, terutama selama krisis. Krisis global yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008 dipicu oleh runtuhnya sistem pasar keuangan dan kegagalan sektor perbankan untuk mengelola dana masyarakat sehingga mengganggu stabilitas sistem keuangan. Industri perbankan berfungsi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan peredaran uang, juga menjadi penghubung antara pengalokasian dana masyarakat pada sektor investasi dan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, sejak tahun 2002, Bank Indonesia sudah melakukan pembinaan melalui Cetak Biru Pengembangan Sektor Perbankan yang didukung oleh Undang-Undang No.17. Keputusan No. 20 Tahun 2008 memperkuat peran perbankan dalam sektor keuangan negara. (Novi, 2017) Sistem perbankan ganda yang diterapkan Bank Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas melalui peningkatan perekonomian nasional. Maka dari itu, visi, misi dan tujuan Bank Syariah Nasional adalah untuk meningkatkan pergerakan perekonomian negara serta kesejahteraan dan kepentingan penduduk luas.

Kontribusi bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dimulai dengan penerbitan mata uang kertas, menggantikan mata uang berdasarkan produk seperti emas dan perak. Peranan ini semakin besar karena tabungan bank sudah melebihi banyaknya uang kertas yang beredar. Oleh karena itu, fungsi bank sentral yaitu mengawasi stabilitas sistem keuangan suatu negara yang tidak terlepas dari kebijakannya. Di tingkat global, sebagai respons terhadap krisis Asia tahun 1997-1998, banyak bank sentral Eropa membentuk Forum Stabilitas Keuangan pada bulan April 1999 untuk mempromosikan pentingnya stabilitas keuangan internasional. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia bersama-sama merilis Program Penilaian Sektor Keuangan untuk menilai stabilitas sistem keuangan suatu negara. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 sesungguhnya menjadi bagian dari Krisis Finansial Asia (Asian Financial Crisis), yang menjadi gabungan serius antara perilaku pasar keuangan yang tidak terkendali dan kebijakan pemerintah yang lemah. Pada waktu tersebut, nilai tukar rupiah jatuh drastis dengan inflasi mencapai sekitar 70%, sementara banyak perusahaan, terutama yang memiliki utang dalam dolar AS, menghadapi kebangkrutan dikarenakan beban utang yang membengkak.

Dampak dari peristiwa ini sangat besar. Krisis tersebut menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran hingga sekitar 14 juta orang. Nilai rupiah juga terjun bebas, dari Rp 4.000 per dolar AS menjadi Rp

16.000 per dolar AS. Selama tahun 1998, terjadi bentrokan antara aparat negara dan masyarakat. Ratusan perusahaan, baik yang berskala kecil maupun konglomerat, mengalami kebangkrutan. Lebih dari 70% perusahaan yang terdaftar di pasar modal mendadak gulung tikar. Pengangguran melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, mencapai sekitar 20 juta orang atau lebih dari 20% dari total angkatan kerja. Akibatnya, angka kemiskinan juga meningkat, dengan sekitar 50% penduduk Indonesia jatuh ke dalam kemiskinan pada tahun 1998. Melihat dampak tersebut, pemerintah saat ini berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan agar krisis serupa tidak terulang lagi. (Dwi et al., 2023)

Saat ini, belum ada mekanisme standar Pengelolaan anggaran negara dalam respons keterpurukan. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) diperlukan untuk melindungi struktur keuangan dari dampak keterpurukan, dalam antisipasi maupun penanggulangannya. Kini, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK menjadi pedoman utama. Republik Demokratik memainkan peran penting dalam merespons krisis sesuai dengan Pasal 20A UUD 1945 yang mengatur fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Republik demokratis memerlukan peran parlemen untuk menyusun undang-undang sebagai landasan hukum dalam merespons suatu keterpurukan, sedangkan fungsi anggaran diperlukan ketika dana publik digunakan sebagai opsi untuk merespons suatu krisis, sementara fungsi anggaran diperlukan ketika penggunaan dana publik menjadi opsi dalam penanganan krisis tersebut.

Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga stabilitas Sistem Keuangan

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran-peran ini melibatkan strategi dan alat khusus untuk menjamin stabilitas:

1. Stabilitas Mata Uang. Bank Indonesia bertugas Memelihara kestabilan nilai mata uang, termasuk melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
2. Kesehatan Lembaga Keuangan. Bank Indonesia berperan penting untuk menjaga kesehatan institusi keuangan, terutama industri perbankan.
3. Sistem Pembayaran. Bank Indonesia mempunyai kuasa dalam mengatur dan menjamin kesesuaian metode transaksi. Jika terjadi kegagalan pembayaran terhadap sistem, maka berisiko mengganggu keseluruhan sistem pembayaran.
4. Pemantauan dan Penelitian. Melalui penelitian dan pengendalian makroprudensial, Bank Indonesia bisa memperoleh data mengenai potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan dan mengidentifikasi potensi guncangan yang dapat mempengaruhi sistem keuangan.
5. Sistem Perlindungan Keuangan. Bank Indonesia berperan sebagai lender of the last resort (LoLR), menjadi penopang terakhir untuk menjaga stabilitas keuangan

Dengan peran tersebut, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan moneter secara kestabilan sistem keuangan, mengawasi pelaksanaannya, dan Berlangsung mulus tanpa menyebabkan permasalahan makro ekonomi. Akan tetapi beberapa masalah yang timbul melalui sektor mikro ekonomi seperti asuransi yang dampak ekonominya lebih detail. Untuk mengawasi hal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang mengawasi kebijakan moneter dari sudut pandang mikroprudensial.

Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

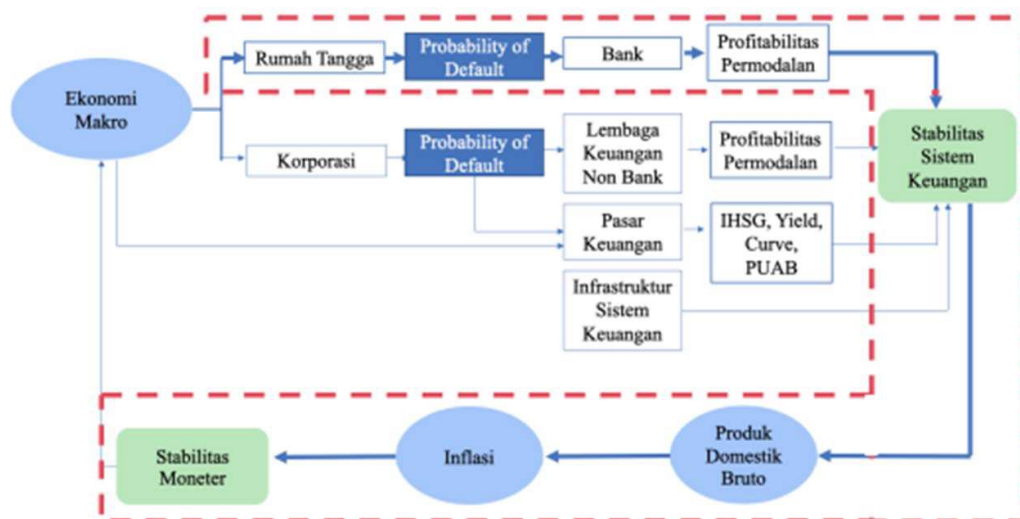
1. Sektor layanan keuangan yang tertata, berkeadilan, terbuka, dan dapat dipercaya.
2. Mengembangkan sistem keuangan yang stabil dan tumbuh secara terus menerus.
3. Menjaga pelanggan dan kepentingan sosial.

OJK berfungsi sebagai pengatur umum dan pengawas sektor keuangan, di antaranya perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB). Kerja sama Bank Indonesia

dan OJK akan membantu penguatan pengawasan hingga lebih detail. Kolaborasi ini memudahkan masyarakat untuk bertanya dan memecahkan masalah keuangan. Efektivitas kedua lembaga ini sangat membantu di tingkat kabupaten dan kota, meskipun masih diperlukan promosi lebih lanjut agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil secara optimal. Melalui sosialisasi yang mendalam, masyarakat dapat mengelola sistem keuangan dengan lebih baik. (M. Umar, 2015)

Indikator Moneter dan Peran dalam Mengatasi Stabilitas Ekonomi

Strategi moneter adalah salah satunya kebijakan penting yang diterapkan oleh bank sentral untuk mengontrol aspek moneter dalam perekonomian suatu negara. Peran utama dari kebijakan ini ialah mengendalikan jumlah uang yang beredar dan biaya pinjaman guna mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan moneter, dan tingkat pengangguran. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga stabilitas moneter, dengan sasaran utama bank sentral biasanya adalah mempertahankan pertumbuhan yang rendah dan stabil, sehingga tercipta lingkungan keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Pengaturan moneter melibatkan siklus dinamis yang mencakup evaluasi kondisi ekonomi pada masa ini, perkiraan masa depan, serta penilaian dampak dari kebijakan yang telah diterapkan. Bank sentral memiliki tugas untuk memastikan stabilitas keuangan dengan menerapkan berbagai instrumen, seperti kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penetapan cadangan minimum bagi bank. Namun, dalam memelihara kesehatan sistem keuangan, kebijakan moneter menghadapi tantangan, seperti perubahan ekonomi yang tak terduga, risiko global, serta perubahan perilaku konsumen dan pembuat kebijakan. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan moneter dan fiskal, serta dampak sosial dan distribusi dari kebijakan moneter, menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas moneter secara keseluruhan.



Gambar 1. Stabilitas keuangan dan pengendalian moneter mempengaruhi ekonomi rumah tangga. (Eva et al., 2023)

Sumber: Bank Indonesia

KESIMPULAN

Bank Indonesia (BI) memainkan peran vital dalam menjaga kestabilan sistem keuangan nasional dengan pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif, pengaturan sistem pembayaran, dan pengawasan sektor perbankan. Kolaborasi antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan transparan, di mana BI

fokus pada stabilitas moneter dan OJK mengawasi kesehatan lembaga keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transmisi kebijaksanaan moneter yang diterapkan BI berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memitigasi risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kestabilan struktur keuangan, disarankan agar Bank Indonesia dan OJK terus meningkatkan kerjasama dalam pengawasan dan regulasi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kebijakan dan instrumen yang ada kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil, guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan. Terakhir, pengembangan indikator moneter yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global juga diperlukan untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penelitian ini, khususnya kepada rekan-rekan penulis yang telah memberikan dukungan, ide, dan masukan yang sangat berarti dalam proses penulisan karya ilmiah ini, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan dalam memastikan kebenaran serta kelancaran penyusunan karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan pahala yang setimpal. Bantuan dan dukunganmu sangat berharga dalam penulisan artikel "Peran Bank Sentral Dalam Mengawasi Stabilitas Lembaga Keuangan Nasional". Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan Masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F., Ahmad, N. H., Angellina, M. S., Attisha, A. S., Hatkasum, R. M., Nurjani, S., Rulyannas, T. I., Sekararum, S. P. (2023). Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Serta Mengalihkan Tugas Ke Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 3(1), 56–62. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.641>
- Bachtiar, S. (2019). Aspek Yuridis UU No. 10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *http://jurnal.ensiklopediaku.org*, 1(1), 142-148. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/297>
- Dea, E. R., Nanda, P. A., & Vedy, M. A. (2024). Analisis Strategi Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia, Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 21-30. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i1.6620>
- Dwi, N. M., Mohammad, R. K., Muhammad, Y. (2023). Faktor-Faktor Krisis Dan Dampak Krisis Yang Pernah Terjadi Di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 181-193. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>
- Eva, V. A. M., Kristian, R. S., Roy, A. S. H., Dirga, A. S., Miftahul, J., Dewi, M. R. (2023). Studi Kajian Indikator Moneter Dalam Menguatkan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(3), 243-248. <https://www.scribd.com/document/731407586/243-248-Studi-Kajian-Indikator-Moneter-Dalam-Menguatkan-Stabilitas-Ekonomi>
- Fani, A., & Roni, M. (2022). Urgensi Bank Sentral Indonesia Dalam Mengendalikan Laju Inflasi Melalui Sektor Riil. *Jurnal Ekonomi SYariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 3(1), 1–15. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/608>
- Hengki, H. (2023) Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36-44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>

- M. Umar, M. P. (2015). Peran dan Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian Sumatera Utara. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 5(1), 41-49. <https://doi.org/10.55601/jwem.v5i1.224>
- Novi, I., S. (2017). Peran Bank Syariah Dalam Pengendalian Harga (Studi Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 55-74. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/6520>
- Rini, P. A., Lisa, M. W., Desi, D. S. (2024). Perkembangan Bank Sentral: Status, Kedudukan, dan Tugas dari Bank Sentral. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(3), 166-177. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.600>
- Rustam, M, P. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Surti, Y. (2017). Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 1(1), 61-72. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/158/116>
- Tia, I., Rika, K., Hikmatul, H. (2017). Analisis Kinerja Bank Indonesia Sebagai Stabilisator Inflasi Dan Kurs Rupiah Di Bidang Moneter. *Journal Of Applied Business and Economics*, 4(3), 250-265. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v4i3.2025>
- Yolanda, A. U., Thomas, A., Ukhti, C. (2022). Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Harga Aset di Sektor Finansial. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 1(2), 121-130. <http://dx.doi.org/10.23960/efebe.v1i2.15>
- Yunan, H. P., Nur'aeni, N., & Setiawan, S. (2022). Peran Bank Indonesia dalam Menstabilkan Perekonomian dan Jumlah Uang Beredar Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Dimamu*, 1(2), 231-240. <https://doi.org/10.32627/dimamu.v1i2.482>